

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TANG KECAMATAN BOKAT, KABUPATEN BUOL

Suparman Dg Lawi¹, Ramli Mahmud², Saleh Al Hamid,³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No.6, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Email: mandglawi@gmail.com, ramlimahmud33@ung.ac.id, salehalhamid@ung.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the Implementation of Social Assistance Distribution Policy for the Tang Village Community, Bokat District, Buol Regency, with a focus on the effectiveness of implementation, target accuracy, and its impact on the socio-economic conditions of residents. The research method used is the Descriptive Method with a qualitative approach. with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The data analysis technique in this study was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that although the social assistance program has reached most of the people in need, there are still several obstacles such as inaccurate recipient data, late distribution, and minimal policy socialization at the village level. Therefore, it is necessary to increase the capacity of village officials, update recipient data regularly, and transparency in the distribution process to ensure that the social assistance policy can run more optimally and on target.

Keywords : social assistance, public policy, rural communities, effectiveness, targeting accuracy

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Impelemntasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol, dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi warga. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program bansos telah menjangkau sebagian besar masyarakat yang membutuhkan, masih ditemukan beberapa kendala seperti data penerima yang kurang akurat, keterlambatan penyaluran, dan minimnya sosialisasi kebijakan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, pemutakhiran data penerima secara berkala, serta transparansi dalam proses distribusi untuk memastikan kebijakan bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci : bantuan sosial, kebijakan publik, masyarakat desa, efektivitas, ketepatan sasaran

PENDAHULUAN

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ialah keadaan di mana kebutuhan akan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran

keluarga, kondisi tempat tinggal, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap pelayanan pendidikan, tingkat kemiskinan, serta kondisi sosial lainnya.

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai kesejahteraan masyarakat, terutama pada segmen yang kurang mampu atau dirugikan karena kemiskinan, kondisi hidup yang buruk, pendidikan yang buruk, atau sejenisnya. Istilah ini juga dapat 2 didefinisikan sebagai layanan sosial yang diberikan kepada warga negara dan

masyarakat oleh pemerintah masing-masing (Vrba, 2023).

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada, baik di negara maju maupun negara berkembang yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat (Bustamam et al., 2021). Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi terutama pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 1998 yang mencapai angka 24,2 persen. Pada tahun 2006 terdapat peningkatan Penduduk Miskin yang cukup tinggi, menyentuh angka 17,8 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16 persen. Di mulai tahun 2007 hingga 2023 Penduduk Miskin Indonesia berangsur-angsur menurun. Hanya saja pada tahun 2021 Penduduk Miskin Indonesia kembali mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan angka sebesar 10,1 persen. Angka Persentase Penduduk Miskin berada di puncak tertinggi pada tahun 1998 karena disebabkan oleh krisis ekonomi Indonesia. Peningkatan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2006 dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan primer dan inflasi umum yang mencapai 17,95 persen dari Februari 2005 hingga Maret 2006 (Soleh, 2015).

Sementara itu, Persentase Penduduk Miskin yang meningkat terjadi pada tahun 2021 diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tahun 2020, sehingga dampaknya masih berlanjut hingga tahun 2021. Kemiskinan yaitu kondisi seseorang yang berpendapatan rendah sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah salah satu indikator yang paling mudah digunakan untuk mengukur kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat Kemiskinan dapat mencerminkan kondisi Kesejahteraan Masyarakat yang rendah. Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat mengalami berbagai perkembangan. Kesejahteraan masyarakat

diupayakan agar masyarakat tersebut dapat menikmati kehidupan yang layak serta memiliki peluang untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini bertujuan agar fungsi sosial dan ekonomi dapat mereka jalankan dengan baik (Putri, 2022).

Bantuan sosial (BANSOS) adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dari pemerintah daerah setempat kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan tidak selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. bantuan sosial tersebut menjadi salah satu jenis belanja daerah yang mengundang perhatian banyak pihak. bantuan sosial menjadi menarik karena banyak melibatkan pihak yang membutuhkan terutama masyarakat miskin. masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

Keinginan masyarakat di era keterbukaan mengenai adanya program bantuan sosial ini untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas sudah menjadi tuntutan yang tak terelakkan bagi pemerintah. namun keinginan tersebut rupanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena perilaku dari birokrat yang berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. hal demikian menjadi ironi karena disisi lain pemerintah sedang melakukan renovasi birokrasi. dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok atau anggota masyarakat.

Bansos tidak boleh diberikan pada setiap tahun anggaran, walaupun ada yang diberikan secara terus - menerus, itu ada sebab lain, misalnya supaya penerimaan bantuan bebas dari resiko sosial. untuk mengatasi masalah ini maka disusun pemendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan buletin teknis nomor 10 tentang akuntabilitas belanja bantuan sosial tahun 2011 yang mengatur tentang pengucapan

belanja bantuan sosial pada catatan atas laporan keuangan.

Penyaluran bantuan sosial (BANSOS) merupakan kebijakan administratif masing-masing pemerintah daerah. Namun akibat dari ketidakseragaman pedoman yang berkaitan dengan belanja Bansos di setiap daerah yang diperlihatkan pemerintah daerah. Meskipun belum ada penelitian yang menunjukkan secara spesifik yang membuktikan pengaruh karakteristik organisasi terhadap pengungkapan belanja Bansos, tetapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan karakteristik dari suatu organisasi dengan penerapan kebijakan, kinerja ataupun tingkat pengungkapan secara umum.

Daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan daerah tersebut setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib dan yang berhak menerima bantuan sosial adalah masyarakat yang sedang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, agar masyarakat yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bantuan sosial juga dapat diberikan kepada lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi masyarakat dari kemungkinan bakal terjadinya resiko sosial.

Kriteria penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah administratif pemerintah kabupaten (pemkab) yang bersangkutan dan memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari program pemerintah yaitu Bansos adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Kepada keluarga miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikategorikan dalam keluarga miskin. Bantuan yang diberikan secara selektif dan penggunaan anggarannya jelas.

Upaya pemerintah dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial harus mempertimbangkan kriteria dan rasionalitas yang jelas dengan memperlihatkan asas

manfaat, keadilan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Dalam penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian objek belanja sehingga jelas penerimaannya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.

Kebijakan merupakan suatu hal yang serupa dengan masalah organisasi, organisasi yang dimaksud mencakup organisasi pemerintahan secara umum, maupun yang ada dalam pemerintahan serta organisasi non pemerintahan atau organisasi swasta. Sebagai suatu dimensi yang ada dalam bidang administrasi publik kebijakan mempunyai peran yang penting terhadap hal-hal yang harus diberikan kepada publik dalam hal penentuan suatu formulasi dalam rangka pemecahan suatu yang dianggap menjadi kesenjangan publik.

Kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut merupakan wujud dari kebijakan sosial, karena berupa pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah di capai agar tidak turun kembali.

Peraturan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi dan bantuan sosial yang menyeluruh langsung untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat miskin masih mengalami kendala di Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Sehingga muncul beberapa dampak seperti mendidik hidup bermalas malas, terjadinya rentan konflik dan mendidik hidup berlebih-lebihan / boros dalam pemberian bantuan sosial.

Penelitian evaluasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui hasil dari kinerja pemerintah dalam pemberian bantuan sosial. Dalam kebijakan ini diperlukan evaluasi dampak, sehingga dapat diketahui dampak positif dan negatifnya. Serta faktor yang

mempengaruhi bantuan sosial yang diterima masyarakat miskin.

Sebagaimana yang terjadi pada observasi awal bahwa di Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. selain menyalurkan bantuan langsung uang tunai dan raskin yang merupakan program nasional pemerintah, pihak pemerintah desa atau aparat desa juga menyalurkan bantuan sosial seperti penyediaan pupuk dan bibit unggul bagi para petani, kartu sehat untuk pengobatan gratis dan bantuan beda rumah untuk rumah yang tak layak huni. semua bantuan sosial tersebut diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat khususnya masyarakat yang berdomisili di Desa Tang. hal demikian yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui sejauh mana dampak dari kebijakan pemberian bantuan sosial tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, berlawanan dengan pendekatan eksperimental. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau penggabungan berbagai sumber data. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan fenomena daripada upaya generalisasi (Sugiyono, 2016, hlm. 2). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Di Desa Tang, Kec. Bokat, Kab. Buol.

Berkenaan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur birokrasi, dalam hal ini penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantaranya implementor

bagian kesejahteraan dan bantuan sosial leading sector yang berada di bawahnya, sehingga ditemukan bahwa implementasi pemberian bantuan sosial di Desa Tang pada dasarnya terlaksana dengan baik. ha ini tentu sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Menurut george edward III (1980 :17) yang menegaskan syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. keputusan kebijakan dan pemerintah pelaksanaan harus diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. komunikasi ini dibagi lagi oleh edward III dalam tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan dimensi kekonsistenan.

Selain komunikasi maka yang diperlukan adalah sumber daya, menurut pandangan Edward III (1980) menyatakan bahwa “tidak peduli seberapa jelas dan konsisten pemerintah pelaksana berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif” dari hasil penelitian, dapat disimpulkan jenis-jenis sumber daya yang dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijakan. hasil temuan menunjukkan Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan sosialisasi mengenai pemberian bantuan sosial di Desa Tang dapat dilakukan secara rutin. Kondisi ini sejalan dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang menyatakan bahwa kelancaran implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan sumber daya, termasuk anggaran.

disamping itu disposisi juga memainkan peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan. hal ini senada dengan pandangan Edward III (1980:11) menjelaskan dalam bukunya “*implementing public policy*” yaitu tentang disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika

implementasi ingin dijalankan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keseriusan dalam penanganan program pemberian bantuan sosial di Desa Tang masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting mengingat kebijakan tersebut memiliki tujuan dan latar belakang yang strategis, yakni untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu struktur organisasi, Dalam penelitian ini tidak terlihat bagian kesejahteraan dan bantuan sosial memiliki struktur organisasi yang lengkap, sehingga bisa dikatakan implemetasi penyaluran bantuan sosial kurang berjalan lancar. Hal ini tentu sejalan dengan pandangan Edward III (1980:11) mengatakan bahwa, bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan eksis dan pelksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih bisa gagal karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Edward III (1980:125) mengidentifikasi karakteristik yang paling menonjol dari birokrasi adalah Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol

Berkenaan dengan hal imlemetasi kebijakan bantuan sosial temuan menunjukkan pelaksanaan program bantuan sosial ini hampir terpenuhi, walaupun masih ada lapisan masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program ini. akan tetapi hal ini bertentangan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Van Meter Dan Van Horn (dalam Winarno, 2002 :102) Ia berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik dibatasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari

unsur pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat desa Tang belum tercapai sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari pencapaian bantuan sosial. Fakta di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. Meskipun terjadi kemajuan dalam hal kemampuan institusional, pencapaian tujuan program secara keseluruhan masih belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas implementasi kebijakan, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan dan dukungan yang lebih komprehensif agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara maksimal.

Dilain sisi komunikasi memberikan hubungan terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial, hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan program bantuan sosial terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Proses komunikasi kebijakan berjalan efektif, ditunjukkan melalui adanya sosialisasi dari pemerintah, kelancaran penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, serta konsistensi dalam pesan kebijakan tanpa adanya pertentangan antar pihak pemerintah. Sedangkan terdapat faktor penghambat Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum adanya komunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan program bantuan sosial. Kondisi ini menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan bantuan sosial. Hal ini seiras dengan yang disampaikan oleh George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 hal yang

perlu diperhatikan yaitu tranmisi, cicarity dan consistensy.

Selain itu, sumber daya memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Hessel (2003:55) mengemukakan bahwa Perintah implementasi mungkin telah ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten. Namun, apabila para pelaksana kebijakan (implementor) tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi kemungkinan besar tidak akan berjalan secara efektif.

perlu diakui bahwa hubungan sumber daya dengan implemetasi kebijakan terdapat faktor pendorong dan penghambat. faktor pendorong dapat dilihat Pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberian bantuan sosial, meskipun partisipasi tersebut hanya berupa sumbangan tenaga dan material. Selain itu, pelaksana juga menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan program bantuan sosial. Keberhasilan penyaluran bantuan sosial turut didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Di samping itu, adanya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan penyaluran bantuan sosial menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas implementasi program tersebut.

Faktor pendorong juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Salah satu temuan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan para penerima bantuan sosial berdampak pada kurangnya pemahaman mereka terhadap program tersebut. Selain itu, tidak adanya dukungan pendanaan organisasi yang memadai menyebabkan keterbatasan finansial dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Sikap pelaksana memiliki peran penting dan berkorelasi erat dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini sudah diungkapkan oleh Hessel (2003:90)

sebagai berikut : jika para implementor/pelaksana memperhatikan terhadap suatu kebijakan khsuus,maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebgaimana yang dimaksud para pembuat keputusan namun ketika sikap atau prespektif para implentor ini berbeda dari pembuat keputusan,maka proses pengimplementasian sebuah kebijakan menjadi lebih sulit. berkenaan dengan hal itu temun menunjukkan terdapat faktor pendorong dan penghambat dari sikap pelaksanaan, salah satu faktor pendorong diantaranya Pelaksana program bantuan sosial memiliki persepsi yang positif dan mendukung terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, para pelaksana juga menunjukkan tindakan dan langkah-langkah nyata dalam proses penyaluran bantuan sosial, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap keberhasilan program tersebut. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksana penyaluran bantuan sosial di Desa Tang yaitu kurangnya respon para pelaksana program bantuan sosial yang menganggap kebijakan program bantuan sosial adalah kebijakan program bantuan rutin belaka.

Selain itu Struktur Birokrasi memainkan peran dalam implemetasi kebijakan, Pngertian birokrasi merujuk pada suatu organisasi yang dimaskudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus,untuk mencapai suatu tujuan tertentu,dengan kata lain,birokrasi adalah organisasi yang bersifat hirarkhis,yang ditetapkan secara rasional untuk menkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan.dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan program bantuan sosial di Desa Tang berjalan cukup lancar. Meskipun pelaksanaannya belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hampir seluruh tahapan dalam proses pengusulan dan pengelolaan bantuan sosial telah dilaksanakan. Dalam implementasinya, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi penyaluran bantuan sosial di Desa Tang. Faktor penghambat meliputi aspek komunikasi dan struktur birokrasi yang belum optimal. Sementara itu, faktor pendukung terdiri atas disposisi atau sikap pelaksana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kecukupan sumber daya yang mendukung kelancaran program.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *PERSPEKTIF*, 9(1), 66-78.
- Aksara Moleong, Lexy J. 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, I., Sakir, M., Bau, H., & Purwanto, P. (2022). Kinerja Birokrasi Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 103-123.
- Ameliya, R. N. (2021). Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banjarmasin (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Anwar, D. P., Ati, N. U., & Pindahanto, R. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Respon Publik*, 14(3), 1-7.
- Aprilia, Y., Latifah, L., & Ritonga, I. (2022). Systematic literature review: kebijakan pemerintah terhadap penyaluran dana bantuan sosial bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 59-76.
- B. Milles, Matthew, Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku*
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada
- CAHYANI, A. D. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN (BSP) DI KELURAHAN PATEMON KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG SKRIPSI.
- Danim, Sudarwan. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Bumi
- FILSA, A. (2019). PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUMBAWA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1.
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(2), 78-87.
- Masnah, M. (2021). MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Mufida, N. U. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di kelurahan Purwosari kecamatan Purwosari kabupaten

- Pasuruan. Jurnal sosial dan sains, 1(2), 82-92.
- Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nur Wakhid, A. (2023). IMPLEMENTASI METODE SMART UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Octavia, M. L. (2022). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI DESA PALASARI KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, terjemahan Rawamangun-Jakarta: Kencana Prenada Media.
- PRASETYO, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LARANGAN SELATAN KOTA TANGERANG (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2), 407-416.
- Rahmawati, F., & Ahzar, F. A. (2020). Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Doctoral dissertation, IAIN SURAKARTA).
- Rianse, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta
- Samsudin, M., Kusuma, A. R., & Djaja, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 74-87.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Sherraden, Michael. 2006. Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan, terjemahan, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sitanggang, B. (2014). Implementasi kebijakan penyaluran hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya (Doctoral dissertation, Tanjungpura University).
- Soeharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung: Soeharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Soewarno. Handyaningrat. 2007. Pengantar studi dan Administrasi, Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. "Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus"
- Sulfia, M. R. (2023). RANCANG BANGUN ALAT PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN E-KTP (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Sumber tentang Metode-Metode Baru, terjemahan, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- TAQWIYAH, M. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL (STUDI EMPIRIS

PADA DINAS SOSIAL DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta).

Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M.
(2020). Evaluasi kebijakan penyaluran
dana bantuan sosial di pemerintah
kabupaten ganyar. *Public Inspiration:
Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28-42.